



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251538, Faksimili (021) 7251538

Nomor : **HM 01-SO/48** Jakarta, **16** Februari 2023
Lampiran : -
Hal : Korespondensi/ Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian PUPR

Yth.
Kepala Biro Umum
Di -
Tempat

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 987 tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR serta dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi, khususnya terkait Pelayanan Informasi Publik, bersama ini dengan hormat kami mohon agar seluruh korespondensi/surat yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian PUPR untuk disampaikan kepada Biro Komunikasi Publik di Gedung Utama Lantai 4.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Biro Komunikasi Publik
Selaku Wakil PPID I



Tembusan:

- Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku Atasan PPID Kementerian (sebagai laporan).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251538, Faksimili (021) 7251538

Nomor : HM 0501-Sj/246 Jakarta, 17 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Data Produk Pelayanan Administrasi (Perizinan dan Non Perizinan)

Yth.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Nomor: B/33/PC.02/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, perihal: Permintaan Data, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rekap Data Produk Pelayanan Administrasi (Perizinan dan Non Perizinan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (berkas terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Mohammad Zainal Fatah
NIP: 196610211996031001

Tembusan:
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Data Produk Layanan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nama Instansi	Unit Kerja Eselon I	Unit Kerja Eselon II	Unit Kerja Eselon III	Ruang Lingkup Pelayanan Publik (Administratif/Jasa/Barang)	Produk Layanan	OSS/NON OSS	Pengguna Layanan	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	KEMENTERIAN PUPR	DITJEN SUMBER DAYA AIR	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	Administratif	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan usaha	*Terlampir
2				Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan	Administratif	Izin Penggunaan Sumber Daya Air	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan usaha, instansi pemerintah	
3			Seluruh Balai Sungai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air	Kepala Bidang BBWS/Kepala BWS	Administratif	Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan usaha, instansi pemerintah	
4		DITJEN BINA MARGA	Setiap Balai Jalan di lingkungan Ditjen Bina Marga	Seksi/Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Nasional	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang	
5			Direktorat Jalan Bebas Hambatan	1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan 2. Subdirektorat Pengadaan Tanah 3. Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 4. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan	Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Right of Way)	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang	
6					Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan Tol	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang	
7					Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Kendaraan dengan Angkutan Berat/ Khusus	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang	

8					Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Keperluan Tertentu/ Sementara	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang
9					Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Izin Pembangunan Overpass/ Underpass	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang
10					Administratif	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol: Izin Pembangunan Sim pang Susun dan Prasarana Transportasi Lain Sejajar Jalan Tol	NON OSS	Masyarakat baik perorangan, badan hukum atau kelompok, serta Instansi Pemerintahan, Badan Usaha, Perusahaan, Pengembang
11		DITJEN CIPTA KARYA	Direktorat Bina Penataan Bangunan	Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Administratif	Pelayanan Rumah Negara Gol.III	NON OSS	Penghuni rumah negara gol. III
					Administratif	Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	OSS dan NON OSS	Masyarakat baik perorangan (melalui SIMBG) maupun badan usaha (melalui OSS)
12			Direktorat Air Minum	Balai Teknologi Air Minum	Jasa	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Air Minum	NON OSS	-Unit kerja di Kementerian PUPR - Penyelenggara SPAM (BUMD, UPT/UPTD, kelompok masyarakat)
13					Jasa	Penerimaan dan Pengujian Sampel Laboratorium Bidang Air Minum	NON OSS	- Masyarakat umum - PDAM - Badan usaha yang memenuhi kebutuhan air minum sendiri - Pelaku usaha dibidang air bersih/air minum
14					Jasa	Sewa Ruangan dan Asrama	NON OSS	- Masyarakat umum - Penyelenggara SPAM (BUMD, UPT/UPTD, kelompok masyarakat) - Badan usaha yang memenuhi kebutuhan air minum sendiri - Pelaku usaha dibidang air bersih/air minum
15			Direktorat Sanitasi	Balai Teknologi Sanitasi	Jasa	Sewa Ruang dan Fasilitas	NON OSS	Masyarakat umum, instansi pemerintah dan swasta serta internal PUPR
16					Jasa	Audit Teknologi	NON OSS	Internal PUPR
17					Jasa	Bimbingan Teknis Bidang	NON OSS	Instansi pengelola bidang
18					Jasa	Penerimaan dan Pengujian	NON OSS	Masyarakat umum, instansi
19					Jasa	Inspeksi/ Sertifikasi Produk	NON OSS	PT/CV produsen pabrikasi

20		DITJEN BINA KONSTRUKSI	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Jasa	Sibima Konstruksi	NON OSS	1. Mahasiswa tingkat akhir; 2. Fresh Graduate; 3. Ahli Muda Konstruksi; 4. Calon Pegawai BUJK; 5. Tenaga Ahli Profesional
21			Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi	Administratif	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	OSS	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN)
					Administratif	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	OSS	1. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) 2. Badan Usaha Jasa Konstruksi BUJK Penanaman Modal Asing (BUJK PMA) 3. Usaha Orang Perseorangan
22		BPSDM	1. Pusat Pengembangan Kompetensi SDA & Permukiman 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 3. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Seluruh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jasa	Penyelenggaraan Pelatihan	NON OSS	ASN Kementerian PUPR, ASN Pemerintah Daerah Bidang PUPR
23			Sekretariat BPSDM	Seluruh Balai	Jasa	Peminjaman Ruangan	NON OSS	ASN Kementerian PUPR, ASN

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dasar hukum penetapan IKU adalah Permen PUPR no. 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Kementerian PUPR TA 2021

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air					
IKSS-1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	%	68,60	68,61	100,01%
IKSS-2	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	%	56,88	56,93	100,09%
IKSS-3	Kapasitas tampung per kapita	m ³ /kapita	54,21	58,66	108,21%
IKSS-4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/hektar	20.554	29.322	142,66%
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional					
IKSS	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,19	2,22	98,65%
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	%	70,08	65,84	93,95%
IKSS-2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	57,46	57,09	99,36%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS-4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS-1	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,60	10,26	182,41%
IKSS-2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	27,50	30,38	108,40%
SS-5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS-1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	75,61	77,93	103,06%
IKSS-2	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur PUP yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100,00	111,01	111,01%
IKSS-3	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	75,00	81	108,00%
IKSS-4	Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	%	71,00	81,73	115,11%
IKSS-5	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	%	65,00	80,32	123,57%
IKSS-6	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	51,00	59,78	117,91%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR					114,16%

Sumber: Hasil Perhitungan Unit Organisasi, 2021



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM 0101-Sj/1616
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati
Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023**

Jakarta, 20 Desember 2023

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
4. Seluruh Pegawai.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2023 Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum Tahun 2023, akan diselenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023 pada :

A. Upacara di Kantor Pusat

Hari, tanggal : Jumat, 22 Desember 2023
Waktu : pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Lapangan Upacara Sapta Taruna, Kementerian PUPR
Busana : Batik KORPRI
Inspektur Upacara : Direktur Jenderal Cipta Karya
Tema : **“PEREMPUAN BERDAYA, INDONESIA MAJU”**

B. Untuk unit kerja Balai, dipersilakan untuk melaksanakan upacara sendiri atau bergabung dengan Balai Koordinator, sesuai Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran seluruh Pejabat dan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada upacara tersebut dan Pemberitahuan ini berlaku sebagai **UNDANGAN**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Mohammad Zainal Fatah
NIP.196610211996031001

Ditandatangani secara elektronik

Catatan:

- Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.



Pengecekan Keaslian Dokumen